



Evaluasi Progam Bantuan Langsung Tunai Pada Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Muhammad Yahya¹, Damsar², Heri Hermanto³, Indrayani⁴

^{1, 3, 4} Administrasi Negara, Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

² Sosiologi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding E-mail: cahragell2000@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 10 June 2026

Revised: 20 June 2026

Accepted: 31 July 2026

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Riau Indonesia

ABSTRACT

Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) constitutes one of the social protection policies implemented by the Indonesian government to strengthen the economic resilience of vulnerable households at the village level. This study aims to evaluate the implementation of the BLT-DD program in Lintas Utara Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The research employed a descriptive qualitative approach involving village government officials and beneficiary households as key informants. Data were obtained through in-depth interviews, direct observation, and documentation review. The analytical framework adopted William N. Dunn's policy evaluation criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings demonstrate that the program has contributed to maintaining household consumption and alleviating the economic burden experienced by low-income families. The implementation process was generally carried out according to established procedures and supported by coordination among village stakeholders. Nevertheless, several challenges were identified, including beneficiary targeting inaccuracies, outdated social data, limited

complaint-handling mechanisms, and inconsistencies in beneficiary verification. These conditions affected the overall quality of policy implementation and public perceptions of fairness. The study concludes that although the BLT-DD program has generated meaningful benefits for vulnerable communities, improvements in data governance, transparency, accountability, and participatory monitoring are required to enhance policy effectiveness and distribution equity.

Keywords: Village Fund Direct Cash Assistance; Policy Evaluation; Social Protection; Poverty Alleviation; Village Governance

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan pembangunan yang mendapatkan perhatian serius dalam agenda kebijakan publik di Indonesia. Meskipun berbagai program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial telah dilaksanakan, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai. Kondisi tersebut lebih terasa di wilayah perdesaan yang memiliki karakteristik ketergantungan tinggi terhadap sektor primer serta rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

Dalam upaya memperkuat perlindungan sosial masyarakat, pemerintah mengembangkan berbagai program bantuan yang diarahkan kepada kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan yang memperoleh perhatian luas adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang memanfaatkan Dana Desa sebagai instrumen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Kehadiran BLT Dana Desa menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang bersifat redistributif.

Secara konseptual, BLT Dana Desa dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga, serta meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, melainkan juga oleh kualitas implementasi kebijakan pada tingkat lokal. Ketepatan sasaran penerima, validitas data, transparansi proses penetapan penerima manfaat, dan efektivitas pengawasan merupakan aspek yang sangat menentukan kualitas pelaksanaan program.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial di tingkat desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Winona dan Fanida (2022) menemukan bahwa efektivitas BLT Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendataan dan koordinasi antaraktor pelaksana. Penelitian Winarti dan Priyastivi (2023) juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data penerima sering menjadi penyebab munculnya persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial. Sementara itu, Putri et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembaruan data dan verifikasi penerima manfaat secara berkala.

Desa Lintas Utara yang berada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program BLT Dana Desa secara berkelanjutan. Meskipun program telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih ditemukan berbagai pandangan masyarakat mengenai ketepatan sasaran bantuan dan pemerataan manfaat program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Lintas Utara menggunakan perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi capaian program, menganalisis berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan distribusi bantuan sosial pada masa mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Program BLT Dana Desa serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pendataan dan penetapan penerima manfaat di Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut disajikan data anggaran dan jumlah penerima BLT Desa Lintas Utara Tahun 2021 hingga 2025:

Tahun	Anggaran BLT	Data Penerima
2021	68.400.000,00	19 Orang
2022	86.400.000,00	24 Orang
2023	54.000.000,00	15 Orang
2024	136.800.000,00	38 Orang
2025	104.400.000,00	29 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Lintas Utara (2025).

Data Pemerintah Desa Lintas Utara Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan dan alokasi anggaran BLT Dana Desa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebutuhan kelompok sasaran program. Perubahan jumlah penerima maupun besaran anggaran bantuan menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lintas Utara perlu dilakukan secara komprehensif guna mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di

Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi program, ketepatan penetapan penerima manfaat, serta berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya menggali informasi secara lebih rinci berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program BLT Dana Desa.

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Lintas Utara. Informan yang terlibat meliputi 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, 3 orang staf pemerintah desa, serta 15 orang masyarakat penerima manfaat BLT Dana Desa. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan mereka dalam proses pendataan, verifikasi, penetapan, dan penerimaan bantuan.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program, antara lain data penerima bantuan, laporan realisasi penyaluran BLT Dana Desa periode 2021–2025, berita acara musyawarah desa, arsip administrasi pemerintahan desa, profil desa, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai mekanisme pendataan calon penerima manfaat, proses verifikasi dan validasi data, pelaksanaan musyawarah desa, prosedur penyaluran bantuan, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama implementasi Program BLT Dana Desa.

Selain itu, observasi lapangan dilakukan secara langsung di Desa Lintas Utara guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat penerima bantuan, aktivitas aparatur desa dalam melaksanakan program, serta situasi yang berkaitan dengan proses penyaluran BLT Dana Desa. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai pelengkap dan pembanding terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Teknik dokumentasi juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung berupa laporan kegiatan, daftar penerima bantuan, dokumentasi penyaluran BLT Dana Desa, notulen musyawarah desa, serta dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Desa Lintas Utara.

Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan kecenderungan yang muncul dari temuan penelitian. Setelah itu dilakukan proses penarikan kesimpulan yang disertai verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan validitas dan konsistensi data yang diperoleh.

Melalui rangkaian tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, terutama yang berkaitan dengan

efektivitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses implementasi berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, Program BLT Dana Desa telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi masyarakat penerima manfaat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga dan mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin maupun rentan.

Proses pendataan dan penetapan penerima bantuan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu survei lapangan, verifikasi data, serta musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat. Mekanisme tersebut digunakan untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

3.1 Efektivitas Program BLT Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Program BLT Dana Desa di Desa Lintas Utara telah memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Mayoritas informan menyatakan bahwa bantuan tunai yang diterima digunakan untuk membeli kebutuhan pangan, membayar biaya pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial sebagaimana tujuan utama kebijakan.

Dalam perspektif Dunn (2018), efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Jika dikaitkan dengan tujuan BLT Dana Desa untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat rentan, maka program dapat dikategorikan cukup efektif karena memberikan dampak langsung terhadap kemampuan konsumsi rumah tangga penerima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Winona dan Fanida (2022) yang menyimpulkan bahwa BLT Dana Desa berkontribusi terhadap peningkatan daya tahan ekonomi masyarakat pada tingkat lokal.

3.2 Efisiensi Pelaksanaan Program

Dari aspek efisiensi, proses penyaluran bantuan berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah desa memanfaatkan struktur kelembagaan yang telah tersedia sehingga pelaksanaan program tidak membutuhkan tambahan sumber daya yang signifikan. Penerima manfaat umumnya tidak mengalami hambatan berarti dalam proses pencairan bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya administrasi, waktu, dan biaya operasional telah dilakukan secara relatif optimal. Menurut Dunn (2018), efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, manfaat program yang diterima masyarakat relatif lebih besar dibandingkan biaya administratif yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program.

3.3 Kecukupan Bantuan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Kriteria kecukupan mengukur sejauh mana hasil kebijakan mampu mengatasi permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT Dana Desa mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan pangan dan kebutuhan rumah tangga harian. Meskipun demikian, sebagian informan menyatakan bahwa nominal bantuan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga akibat meningkatnya biaya hidup dan keterbatasan pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BLT Dana Desa berfungsi sebagai instrumen mitigasi ekonomi jangka pendek, bukan sebagai solusi permanen terhadap permasalahan kemiskinan struktural. Temuan ini mendukung penelitian Onibala dan Setyari (2023) yang menyatakan bahwa bantuan tunai lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi konsumsi rumah tangga dibandingkan sebagai mekanisme peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

3.4 Pemerataan Distribusi Bantuan

Aspek pemerataan menjadi salah satu indikator yang masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penerima telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, masih ditemukan fenomena exclusion error dan inclusion error. Exclusion error terjadi ketika masyarakat yang layak menerima bantuan tidak tercatat sebagai penerima manfaat. Sebaliknya, inclusion error ditemukan ketika individu yang kondisi ekonominya telah membaik masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa proses pembaruan data sosial belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika kondisi ekonomi masyarakat desa. Menurut Dunn (2018), pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran secara proporsional. Oleh karena itu, kualitas basis data menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemerataan program bantuan sosial.

3.5 Responsivitas Pemerintah Desa

Responsivitas pemerintah desa tercermin dari kemampuan aparat desa dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan jadwal penyaluran bantuan kepada masyarakat. Informasi program disampaikan melalui kepala dusun, ketua RT, musyawarah desa, dan media informasi desa sehingga sebagian besar masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat masih bersifat informal dan belum terlembagakan secara baik. Akibatnya, masyarakat yang merasa keberatan terhadap hasil pendataan belum memiliki saluran pengaduan yang jelas dan mudah diakses. Temuan ini menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah desa telah berjalan cukup baik dalam aspek komunikasi kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan aspirasi dan keluhan masyarakat.

3.6 Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan merupakan indikator yang paling menentukan kualitas implementasi BLT Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran masih menghadapi tantangan berupa data penerima yang belum diperbarui secara berkala, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keterbatasan proses verifikasi lapangan. Dalam teori Dunn, ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan yang dilaksanakan dan kebutuhan kelompok sasaran. Ketika bantuan diberikan kepada penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, maka efektivitas kebijakan secara keseluruhan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pembaruan data berbasis verifikasi berkala dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pendataan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas implementasi BLT Dana Desa.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan sosial masyarakat. Program mampu membantu rumah tangga rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa akurasi data penerima bantuan masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat dan proses pembaruan data penerima belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat sistem verifikasi dan validasi data secara berkala, meningkatkan transparansi dalam proses penetapan penerima bantuan, serta mengembangkan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan

efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas pelaksanaan Program BLT Dana Desa pada masa yang akan datang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang diperoleh di lapangan, beberapa rekomendasi dapat diajukan kepada pemerintah desa, aparat pemerintah, serta peneliti selanjutnya sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Lintas Utara disarankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan dan data sosial ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain itu, proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan perlu diperkuat guna meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan sasaran. Upaya peningkatan transparansi dalam pelaksanaan musyawarah desa juga perlu terus dilakukan. Di samping itu, pemerintah desa perlu menyediakan sistem pengaduan yang lebih terbuka, mudah dijangkau masyarakat, serta mampu menindaklanjuti setiap keluhan secara cepat dan efektif.

2. Bagi Aparatur Desa dan Pemerintah Daerah

Aparatur desa diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip objektivitas, profesionalisme, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program bantuan sosial. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendukung terciptanya proses penetapan penerima bantuan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten perlu memperkuat fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa. Dukungan teknis terkait pengelolaan data serta pembaruan data penerima manfaat juga perlu diberikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas implementasi program.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka peluang bagi pengembangan penelitian pada masa mendatang. Peneliti berikutnya dapat mengkaji topik yang sama dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun metode campuran (mixed methods) sehingga efektivitas program dan tingkat ketepatan sasaran penerima bantuan dapat dianalisis secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian yang berfokus pada mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat serta tata kelola program bantuan sosial di tingkat desa juga penting untuk dilakukan. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta penyempurnaan pelaksanaan program bantuan sosial di masa yang akan datang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Hermanto, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II dan Prof. Dr. Rer. Soz. Damsar, MA., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Lintas Utara, aparat desa, dan seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi selama proses penelitian berlangsung, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan selama penelitian ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa

mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia usaha, khususnya dalam bidang program bantuan langsung tunai

6. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). Routledge.
- Fauzi, A. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat terdampak krisis ekonomi. *Jurnal Prinsip*, 6(2), 39–52.
- Indrayani, R., Putri, D. A., & Hidayat, R. (2024). Efektivitas tata kelola program desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Publik*, 9(2), 110–123.
- Lestari, D. (2023). Akurasi data penerima bantuan sosial dalam tata kelola Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik IPDN*, 7(1), 63–75.
- Onibala, A., & Setyari, N. P. W. (2023). Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap pengeluaran rumah tangga penerima manfaat. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(2), 225–240.
- Putri, A. N., Saputra, Y., & Rahman, F. (2024). Evaluasi implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Sinergi*, 6(1), 70–85.
- Rahmawati, L., & Nugroho, R. (2021). Ketepatan sasaran bantuan sosial pada tingkat pemerintahan desa. *Journal of Economic Policy*, 4(1), 45–60.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Winarti, S., & Priyastiwi, D. (2023). Evaluasi distribusi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Riset Manajemen*, 8(1), 55–68.
- Winona, A., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat desa. *Publika: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 95–108.